



Department of
Education

Shaping the future

Makalah Diskusi

Ulasan *Undang-Undang Pendidikan Sekolah 1999*

TRIMnumber

[Publish date]



Daftar Isi

Bagian 1 - Pendahuluan	4
Pengakuan Atas Negeri	4
Kata Sambutan dari Menteri	4
Tentang apakah makalah ini?	5
Apa yang dimaksud dengan peninjauan?	5
Apa yang dimaksud dengan <i>UU Pendidikan Sekolah 1999</i> ?	5
Apa yang ada dalam UU PS	5
Apa yang tidak termasuk dalam UU PS	6
Mengapa peninjauan ini diadakan?	6
Bagaimana peninjauan ini dilaksanakan?	6
Bagaimana Anda dapat turut terlibat	8
Apa yang ingin kami dengar dari Anda	8
Pilihan untuk memberikan masukan Anda	9
Jadwal pemberian masukan	9
Bagaimana masukan Anda akan digunakan	9
Cara Membaca Makalah Diskusi	10
Pilihan yang tersedia	10
Dokumen lain yang sebaiknya disediakan	10
Referensi	10
Informasi berguna untuk dipertimbangkan sebelum Anda memberikan masukan	10
Hak asasi manusia	10
Perundang-undangan Nasional	11
Bagian 2 – Daftar seluruh pertanyaan	12
Bagian 3 – Perincian mengenai permasalahan utama dan pertanyaan	14
1. Menetapkan kondisi umum	14
Objek	14
Prinsip-Prinsip	15
Definisi	17
2. Saat mulai sekolah	19
Pendaftaran	19
Pilihan untuk keterlibatan	20
3. Kehidupan di sekolah	22

Peran dan tanggung jawab	22
Hak mendapat penyesuaian dan belajar di kelas yang sama	24
Komunikasi/konsultasi	26
4. Ketika sekolah tidak berjalan dengan baik	27
Disiplin, skorsing, dan pengeluaran	27
Praktik pembatasan	29
Panel Penasihat Disabilitas dan Panel Penasihat Disiplin	31
Perselisihan dan pengaduan	32
Memastikan kita terus makin baik	34
Lampiran A	35
Istilah-istilah penting dan singkatannya	35

Bagian 1 - Pendahuluan

Pengakuan Atas Negeri

Pemerintah Western Australia dengan hormat mengakui Pemilik Tradisional atas tanah, laut, dan perairan. Kami menghormati pertukaran pengetahuan yang kaya dan berkelanjutan melalui bahasa, lagu, ritual, dan kisah selama puluhan ribu tahun.

Kata Sambutan dari Menteri

Pemerintah WA berkomitmen mendukung anak-anak dan remaja penyandang disabilitas dalam pendidikan mereka.



Saya percaya setiap anak dan remaja penyandang disabilitas mempunyai hak atas pendidikan berkualitas di mana mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan didukung untuk mencapai potensi diri mereka yang sepenuhnya.

Penyelidikan yang baru-baru ini dilakukan, seperti Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas telah menyoroti perlunya perubahan untuk memastikan penyandang disabilitas sepenuhnya dilibatkan dalam semua aspek masyarakat.

Saya percaya pendidikan berperan penting dalam perubahan ini. Dalam rangka mewujudkan masyarakat inklusif di mana semua orang dapat mencapai potensi mereka, dan untuk mendukung pertumbuhan anak-anak dan anak muda, kita memerlukan sistem pendidikan yang menumbuhkan rasa hormat, menghargai keberagaman, serta merangkul dan mengakomodasi perbedaan.

Undang-Undang Pendidikan Sekolah tahun 1999 telah dirancang lebih dari 25 tahun yang lalu, dan saya tahu ada kalanya siswa penyandang disabilitas dan keluarga mereka dikecewakan oleh sistem pendidikan.

Makalah Diskusi ini mengundang Anda untuk berbagi gagasan tentang bagaimana *UU Pendidikan Sekolah tahun 1999* ini dapat diubah untuk meningkatkan akses dan inklusi bagi para siswa penyandang disabilitas.

Tentang apakah makalah ini?

Setiap anak dan remaja penyandang disabilitas berhak atas pendidikan berkualitas di mana mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan didukung untuk mencapai potensi diri mereka yang sepenuhnya.

Pada tanggal 4 Desember 2023, Menteri Pendidikan mengumumkan peninjauan atas Undang-Undang Pendidikan Sekolah tahun 1999 (UU PS) untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan guna memperkuat akses dan inklusi bagi para siswa penyandang disabilitas.

Makalah ini merupakan bagian dari peninjauan. Ini merupakan Makalah Diskusi untuk peninjauan tersebut dan bertujuan untuk mengeksplorasi bidang-bidang mana dari UU PS yang menyulitkan siswa penyandang disabilitas untuk dapat diikutsertakan sepenuhnya dan meminta gagasan Anda tentang bagaimana hal ini dapat diubah.

Apa yang dimaksud dengan peninjauan?

Peninjauan atas peraturan perundang-undangan tidak mengubah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peninjauan merupakan suatu proses untuk menjelajahi penelitian, pengalaman dan gagasan, dan kemudian memberikan saran perubahan.

Peninjauan akan diakhiri dengan sebuah laporan akhir. Untuk peninjauan ini, kami akan memberikan laporan akhir kepada Menteri Pendidikan. Laporan tersebut akan berisi rekomendasi bagaimana UU PS dapat diubah.

Selanjutnya, keputusan apakah UU PS ini akan diubah dan bagaimana cara mengubahnya akan berada di tangan Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Mengubah undang-undang merupakan suatu proses yang terperinci. Ini melibatkan banyak tahap dan persetujuan, dan seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Pada akhir proses, kebijakan juga sering kali perlu diperbarui agar selaras dengan undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan *UU Pendidikan Sekolah 1999*?

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS adalah seperangkat undang-undang tentang bagaimana anak-anak dan remaja di WA mengakses pendidikan selama tahun-tahun wajib belajar.

Peraturan ini menjelaskan bagaimana sekolah didirikan dan apa saja yang diperlukan untuk mendaftar dan bersekolah. Hal ini mencakup pilihan pendidikan melalui sekolah pemerintah, sekolah non-pemerintah atau melalui pendidikan di rumah.

UU PS juga menetapkan pilihan bagi anak-anak dan remaja dalam mempelajari program studi non-sekolah pada tahun-tahun terakhir wajib belajar, seperti pendidikan dan pelatihan kejuruan, magang atau pendidikan tinggi.

UU PS juga mencakup berbagai proses yang dilakukan di sekolah pemerintah (juga disebut sekolah negeri atau sekolah publik), seperti skorsing, pengeluaran, keputusan penting, dan penanganan pengaduan.

Untuk sekolah non-pemerintah, yang terkadang disebut sekolah swasta, UU PS mengatur bagaimana sekolah tersebut didaftarkan dan proses pembuatan standar yang harus dipatuhi.

Apa yang tidak termasuk dalam UU PS

Banyak hal tentang sekolah yang tidak termasuk dalam UU PS. Hal-hal ini tidak relevan dengan peninjauan ini. Hal-hal yang tidak termasuk dalam UU PS dan tidak relevan dengan peninjauan antara lain:

- pendanaan untuk sekolah atau siswa perorangan
- pelatihan guru
- kurikulum / apa yang diajarkan di sekolah
- perundungan (bullying) / intimidasi
- ukuran kelas.

Meskipun beberapa hal tersebut mungkin sangat penting bagi Anda, tetapi bukan termasuk dalam cakupan peninjauan ini, sehingga kami tidak dapat bertindak berdasarkan masukan apa pun yang Anda berikan kepada kami mengenai hal tersebut.

Mengapa peninjauan ini diadakan?

UU PS telah dibuat lebih dari 25 tahun yang lalu dan sekarang sudah ketinggalan zaman. UU ini tidak lagi mencerminkan pemahaman dan harapan masyarakat saat ini terhadap siswa penyandang disabilitas.

Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kita dapat mengubah UU PS agar lebih melibatkan anak-anak dan remaja penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas di mana mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan didukung untuk mencapai potensi diri mereka yang sepenuhnya.

Bagaimana peninjauan ini dilaksanakan?

Peninjauan ini dimulai pada bulan Januari 2024 dan dikoordinasikan oleh Departemen Pendidikan, dan dipimpin oleh 2 kelompok utama: panel ahli dan dewan penasihat.

Panel ahli memiliki 7 anggota yang dipilih berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman pribadi mereka. Mereka memahami undang-undang tentang

pendidikan yang inklusif dan dapat diakses, hak asasi manusia, dan praktik terbaik untuk membuat pendidikan inklusif dan dapat diakses.

Dewan penasihat mempunyai 8 anggota yang memiliki pengalaman pribadi dengan disabilitas intelektual dan merupakan pakar dalam bidang advokasi.

Panel ahli dan dewan penasihat akan memimpin peninjauan dalam 3 tahap utama:

1. Penelitian – tahap penelitian sudah diselesaikan. Tahap ini melibatkan eksplorasi tentang:

- apa yang telah diinformasikan oleh anak-anak, keluarga, dan pendidik dalam berbagai laporan dan penelitian di seluruh Australia
- apa yang bisa dipelajari dari wilayah lain di Australia dan luar negeri

2. Konsultasi – tahap konsultasi sedang dilaksanakan sekarang dan melibatkan:

- menuangkan berbagai gagasan pokok dari penelitian ke dalam Makalah Diskusi ini
- mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai Makalah Diskusi

3. Temuan dan rekomendasi – tahap ini akan melibatkan tindakan:

- menganalisis semua yang kami pelajari selama konsultasi
- merangkum temuan-temuan menjadi laporan akhir kepada Menteri

Laporan akhir ini akan merekomendasikan cara-cara yang dapat dilakukan Menteri untuk menyempurnakan UU PS. Laporan akan siap pada akhir tahun 2024 dan hanya diperuntukkan bagi Menteri, sehingga tidak dibagikan kepada publik.

Anggota panel ahli:

Profesor Andrew Whitehouse (Ketua)

Dr. Sarah Bernard

Kane Blackman

Charmaine Ford

Cátia Malaquias

Maria Mansour

Anna Steele

Anggota dewan penasihat:

Michelle Silver (Ketua)

Peter Bluett

Kyal Fairbairn

Liam Flynn

Kristy Marsiglia

James McNulty

Shariq Sharma

Justin Storen

Bagaimana Anda dapat turut terlibat

Apa yang ingin kami dengar dari Anda

Kami ingin mendengar dari semua orang yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kami ingin tahu:

- gagasan Anda mengenai bagaimana UU PS dapat ditingkatkan
- bagaimana menurut Anda gagasan-gagasan Anda akan membantu mencakup para siswa penyandang disabilitas

Kami ingin masukan Anda terhadap 13 pertanyaan. Anda dapat melihatnya di Bagian 2, di halaman 12. Anda dapat menjawab pertanyaan sebanyak atau sesedikit yang Anda suka. Anda mungkin juga ingin mengangkat masalah UU PS yang tidak tercakup dalam Makalah Diskusi ini – itu juga boleh.

Jika Anda bersedia, silakan beritahu kami beberapa informasi tentang diri Anda. Hal ini akan membantu kami memahami keprihatinan umum dan mengetahui apakah kami telah mendengar pendapat dari berbagai kalangan yang luas, atau mungkin melewatkan suara-suara penting di masyarakat.

Misalnya, Anda mungkin ingin memberi tahu kami apakah Anda:

- seorang penyandang disabilitas
- anak, orang tua atau saudara kandung dari penyandang disabilitas
- seorang asisten pendidikan, guru atau kepala sekolah
- apakah masukan Anda berkaitan dengan sekolah pemerintah (sering disebut 'sekolah negeri'), sekolah non-pemerintah (sering disebut 'sekolah swasta') atau pendidikan di rumah.

Pilihan untuk memberikan masukan Anda

Ada beberapa pilihan tentang cara Anda memberikan masukan. Anda bisa:

- menjawab sebagian atau seluruh pertanyaan melalui formulir online yang terdapat di sini <https://www.education.wa.edu.au/web/education-act-sector-review>
- mengirimkan melalui email ke SEA.Review.Secretariat@education.wa.edu.au
- mengirimkan surat ke Department of Education
School Education Act Review
Strategy and Policy
151 Royal Street
East Perth WA 6004

Kami ingin mendengar pendapat Anda, jadi jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengajukan masukan dengan cara lain, silakan kirim email ke SEA.Review.Secretariat@education.wa.edu.au

Jadwal pemberian masukan

Anda dapat memberi kami masukan Anda mulai dari tanggal 16 Agustus 2024 hingga 4 Oktober 2024. Silakan kirim email ke SEA.Review.Secretariat@education.wa.edu.au jika Anda membutuhkan waktu lebih lama.

Bagaimana masukan Anda akan digunakan

Tahap konsultasi adalah tentang mengumpulkan masukan.

Departemen Pendidikan akan meninjau semua masukan dan membagikan temuannya dengan panel ahli dan dewan penasihat. Panel ahli dan dewan penasihat kemudian akan menggunakan temuan ini untuk memutuskan rekomendasi akhir terhadap perubahan UU PS.

Penting untuk Anda ketahui:

- kami tidak dapat membalas kiriman Anda
- informasi apa pun yang Anda berikan dapat tunduk pada permintaan kebebasan informasi, yang harus kami patuhi menurut hukum
- masukan Anda akan dijadikan laporan akhir kepada Menteri Pendidikan. Laporan ini hanya untuk Menteri saja, sehingga tidak akan dipublikasikan.

Cara Membaca Makalah Diskusi

Pilihan yang tersedia

Ada beberapa pilihan berbeda untuk membaca Makalah Diskusi ini.

Ada 3 bagian dalam Makalah Diskusi:

- Bagian 1: membantu memberikan latar belakang peninjauan UU PS dan Makalah Diskusi ini
- Bagian 2: mencantumkan 13 pertanyaan yang kami miliki untuk Anda
- Bagian 3: memberikan lebih banyak detail pada masing-masing topik yang terkait dengan 13 pertanyaan tersebut.

Kami menyarankan semua orang membaca Bagian 1.

Jika Anda hanya ingin melihat pertanyaan yang kami miliki untuk Anda, bacalah Bagian 2. Jika Anda ingin mengetahui lebih detail mengenai topik apa pun yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, bacalah Bagian 3. Anda dapat memeriksa judul di Bagian 3 untuk menemukan area di mana Anda ingin informasi lebih lanjut.

Jika Anda memilih untuk tidak membaca keseluruhan makalah ini, Anda mungkin ingin melihat versi Mudah Dibaca atau menonton beberapa video tentang ulasan tersebut, yang dapat Anda temukan di situs web

<https://www.education.wa.edu.au/web/education-act-sector-review>.

Dokumen lain yang sebaiknya disediakan

Lampiran A mencantumkan istilah-istilah penting dan singkatan yang digunakan dalam makalah ini. Anda mungkin ingin mengacu pada dokumen ini saat Anda membaca makalah.

Anda mungkin juga ingin membuka salinan UU PS saat membaca makalah ini. Anda dapat mengakses versi Word atau PDF UU PS dengan mengeklik [di sini](#).

Referensi

Catatan Kaki dan Catatan Akhir tidak dapat diakses oleh banyak orang, sehingga Makalah Diskusi mencantumkan referensi ini dalam kotak “Hal-hal yang perlu dipertimbangkan”.

Informasi berguna untuk dipertimbangkan sebelum Anda memberikan masukan

Hak asasi manusia

Australia telah meratifikasi 2 perjanjian hak asasi manusia utama yang mengikat secara hukum dan relevan dengan pendidikan siswa penyandang disabilitas. Kedua perjanjian tersebut adalah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC, Convention on Rights of the Child) dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD, Convention on the Rights of People with Disability).

Komisi Kerajaan yang baru-baru ini menangani Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut sebagai Komisi Kerajaan untuk Disabilitas) menyatakan bahwa Western Australia harus meninjau undang-undang dan kebijakan pendidikannya untuk melihat seberapa baik undang-undang dan kebijakan tersebut melibatkan dan menerapkan hak asasi manusia.

Perundang-undangan Nasional

UU PS bukan satu-satunya undang-undang yang memengaruhi cara sekolah beroperasi di WA.

Semua sekolah di Australia harus mengikuti undang-undang nasional yang dibuat oleh Pemerintah Australia. Salah satu undang-undang yang penting adalah *Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas tahun 1992 (Cth) (UU DD)*. Undang-undang ini memungkinkan Jaksa Agung Australia membuat peraturan, yang disebut Standar Disabilitas untuk Pendidikan 2005 (SDP), yang menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah di Australia.

Setiap negara bagian dan teritori dapat memutuskan bagaimana cara menerapkan standar-standar ini dalam undang-undangnya masing-masing. Ada 3 pilihan:

1. Mereka dapat mengabaikan bagian-bagian yang sudah tercakup dalam SDP
2. Mereka dapat menyalin secara persis apa yang ada di SDP atau merujuk pada SDP/UU DD
3. Mereka dapat membuat undang-undang sendiri yang melampaui apa yang ada dalam SDP – ini berarti menetapkan standar yang lebih tinggi

Hal ini penting untuk diketahui ketika memikirkan perubahan UU PS. Undang-undang Pendidikan Sekolah tidak dapat menetapkan standar yang lebih rendah daripada SDP, tetapi dapat mencakup standar SDP atau menetapkan standar yang lebih tinggi (misalnya, menambah materi standar SDP) untuk sekolah-sekolah di Western Australia.

Bagian 2 – Daftar seluruh pertanyaan

Kami memiliki 13 pertanyaan untuk mendengar pemikiran dan gagasan-gagasan Anda. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab satu pun, menjawab sebagian, atau menjawab semua pertanyaan ini.

Kami telah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di bawah ini.

Bagian 3 dari Makalah Diskusi akan memberi Anda lebih banyak informasi tentang alasan kami menanyakan setiap pertanyaan. Di sini juga menguraikan apa yang telah kami pelajari dari penelitian kami untuk masing-masing pertanyaan.

Pertanyaan

1. Apakah objek UU PS perlu diubah untuk meningkatkan akses dan inklusi bagi siswa penyandang disabilitas? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
2. Apakah perlu ditambahkan prinsip-prinsip ke UU PS untuk meningkatkan akses dan inklusi? Jika ya, prinsip apa yang ingin Anda tambahkan?
3. Apakah definisi disabilitas dalam UU PS perlu diubah untuk meningkatkan akses dan inklusi? Jika ya, bagaimana definisinya?
4. Apakah UU PS perlu diubah sehingga ada hak yang jelas bagi siswa penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah negeri setempat?
5. Apakah UU PS perlu memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara siswa terlibat dalam pendidikan? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
6. Apakah UU PS yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab perlu diubah? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
7. Apakah perlu ada perubahan pada UU PS mengenai penyesuaian bagi siswa penyandang disabilitas dan/atau tindakan universal? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
8. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS mengenai tugas berkomunikasi, berkonsultasi dan/atau bekerja sama dengan siswa penyandang disabilitas dan orang tuanya. Jika ya, sebaiknya seperti apa?
9. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS terkait disiplin, skorsing atau pengeluaran? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
10. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS (atau peraturan) mengenai praktik pembatasan? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

11. Apakah perlu ada perubahan pada bagian Panel Penasihat Disabilitas dan/atau Panel Penasihat Disiplin dalam UU PS? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
12. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS sehingga pengaduan dapat ditangani dengan cara yang berbeda? Jika ya, sebaiknya seperti apa?
13. Dengan mempertimbangkan semua perubahan yang Anda usulkan, bagaimana pemerintah dapat memantau apa yang terjadi dan menunjukkan bahwa segala sesuatunya makin baik?

Bagian 3 – Perincian mengenai permasalahan utama dan pertanyaan

UU Pendidikan Sekolah atau UU PS memiliki ketentuan-ketentuan yang memengaruhi keseluruhan perjalanan anak dalam sistem pendidikan. Makalah Diskusi ini membaginya ke dalam 4 judul:

1. **Menetapkan kondisi umum:** hal-hal yang memengaruhi keseluruhan UU PS dan bekerja sama membentuk bagaimana hukum dipahami dan diterapkan, seperti tentang objek, prinsip, dan definisi
2. **Saat mulai sekolah:** bagaimana anak-anak dan remaja mendaftar di sekolah dan pilihan untuk datang ke sekolah atau ke lingkungan pendidikan lainnya
3. **Kehidupan di sekolah:** wewenang dan tanggung jawab guru dan kepala sekolah; kapan dan bagaimana sekolah berkomunikasi dengan siswa dan keluarganya; dan bagaimana sekolah mendukung siswa yang membutuhkan penyesuaian atau dukungan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sekolah
4. **Ketika sekolah tidak berjalan dengan baik:** bagaimana sekolah menangani masalah disiplin, keluhan dan perselisihan, dan peran Panel Penasihat Disabilitas.

1. Menetapkan kondisi umum

Objek

Objek memberikan gambaran luas tentang tujuan suatu Undang-Undang dan apa yang ingin dicapai. Objek membantu memandu cara menafsirkan dan menerapkan suatu Undang-Undang.

Apa yang ada dalam UU PS

Pasal 3 UU PS menguraikan objeknya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak selama tahun-tahun wajib sekolah. Pasal ini juga mengakui pentingnya melibatkan orang tua anak.

Apa yang dikatakan sumber lain

Negara Bagian dan Teritori Australia lainnya serta negara-negara lain mempunyai objek dalam undang-undang pendidikan yang setara yang merujuk pada:

- inklusi
- menanggapi kebutuhan individu anak-anak dan remaja
- fleksibilitas

- mendukung semua anak dan remaja untuk mencapai atau memaksimalkan potensi diri mereka
- membekali siswa dengan keterampilan dan kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan komunitas mereka.

Pertanyaan

1. Apakah objek UU PS perlu diubah untuk meningkatkan akses dan inklusi bagi siswa penyandang disabilitas? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Perhatikan pasal 3 UU PS
- Apakah objek-objek tersebut mendukung siswa penyandang disabilitas agar terlibat dan mendapatkan hasil maksimal dari pendidikan mereka?
- Anda juga dapat melihat objek-objek dalam undang-undang pendidikan di negara lain (tercantum di bawah) dan melihat apakah menurut Anda UU PS seharusnya mempunyai hal serupa.

Referensi penting:

- *UU Pendidikan 2015 (Northern Territory)* – lihat bagian 3
- *UU Pendidikan dan Pelatihan 2020 (Selandia Baru)* – lihat bagian 4 dan 32
- *UU Pendidikan (Ketentuan Umum) 2006 (Queensland)* – lihat bagian 5
- *UU Pendidikan 2016 (Tasmania)* – lihat bagian 3
- *Hukum Keputusan Portugal No. 54/2018*

Prinsip-Prinsip

Undang-undang sering kali mencakup prinsip-prinsip. Prinsip merupakan nilai-nilai inti yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu undang-undang. Prinsip digunakan untuk memandu bagaimana cara menafsirkan suatu undang-undang. Undang-undang yang mempunyai prinsip biasanya akan menyatakan bahwa siapa pun yang menjalankan suatu fungsi berdasarkan undang-undang tersebut harus mengikuti prinsip tersebut.

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS tidak mempunyai prinsip apa pun.

Apa yang dikatakan sumber lain

Bagian 24 (dan Komentar Umum 4) dalam CRPD yang membahas tentang hak asasi manusia pada pendidikan mengatakan bahwa:

- semua siswa, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak atas pendidikan yang inklusif
- pendidikan inklusif membantu semua siswa mempelajari keterampilan hidup dan sosial yang penting sehingga mereka dapat mencapai potensi mereka dan mengambil bagian penuh dalam kehidupan masyarakat

- hak atas pendidikan adalah hak asasi anak, dan tanggung jawab serta pilihan orang tua mengenai pendidikan anak menempati urutan kedua setelah hak asasi anak atas pendidikan.

Di banyak negara bagian dan teritori Australia lainnya, dan di beberapa negara lain, undang-undang pendidikan mencakup prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini mencakup referensi pada:

- akses universal terhadap pendidikan
- mengakui kebutuhan individu pada anak-anak dan remaja
- melibatkan anak-anak dan remaja dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka
- bekerja sama dengan orang tua dan komunitas sekolah
- meyakini bahwa semua anak dan remaja berhak mendapatkan pendidikan dan mampu belajar
- memberikan pendidikan berdasarkan pengalaman belajar yang positif
- mendukung dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi Australia termasuk komitmen terhadap nilai-nilai keterbukaan dan toleransi
- mengikutsertakan siswa penyandang disabilitas dan hak mereka untuk mendapatkan penyesuaian

Pasal 6 *Undang-Undang Pendaftaran Guru Tahun 2012* di WA menetapkan prinsip dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 6 menyatakan bahwa seseorang yang menjalankan fungsi berdasarkan Undang-Undang tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai hal yang paling penting dalam menjalankan perannya berdasarkan undang-undang.

Posisi berbasis prinsip lainnya di WA adalah Langkah Tindakan 1.4 di dalam *Western Australia untuk Semua Orang: Strategi Disabilitas Negara Bagian 2020-2030, Rencana Tindakan Kedua. Langkah Tindakan 1.4 Prinsip-prinsip pendidikan inklusif* adalah tentang penguatan inklusi di sekolah-sekolah negeri dan mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif dalam layanan, program dan fasilitas pendidikan.

Pertanyaan

2. Apakah perlu ditambahkan prinsip-prinsip ke UU PS untuk meningkatkan akses dan inklusi? Jika ya, prinsip apa yang ingin Anda tambahkan?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Anda dapat melihat prinsip-prinsip dalam undang-undang pendidikan lainnya (tercantum di bawah) dan melihat apakah menurut Anda UU PS seharusnya memiliki hal serupa.

Referensi penting

- *UU Pendidikan 2015 (Northern Territory)* – lihat bagian 4
- *UU Pendidikan (Ketentuan Umum) 2006 (Queensland)* – lihat bagian 7
- *UU Pendidikan 2016 (Tasmania)* – lihat bagian 4

- UU Pendidikan 1990 (New South Wales) – lihat bagian 4
- UU Reformasi Pendidikan dan Pelatihan 2006 (Victoria) - lihat bagian 1.2.1
- Hukum Keputusan Portugal No 54/2018

Definisi

Definisi menentukan ruang lingkup istilah-istilah kunci dalam suatu undang-undang.

Apa yang ada dalam UU PS

Istilah penting dan definisi dalam UU PS diuraikan di bagian 4.

UU PS saat ini mendefinisikan istilah *disabilitas*. Istilah ini digunakan untuk berbagai ketentuan dalam UU PS yang dimaksudkan untuk berlaku bagi siswa penyandang disabilitas - seperti pasal 73, 84, 86 dan 92.

Berdasarkan UU PS, disabilitas didefinisikan dengan menggunakan model medis dan terbatas pada kondisi yang bersifat permanen.

Model medis memandang disabilitas sebagai masalah yang ada pada diri seseorang. Ini menganggap perbedaan fisik, mental, atau sensorik sebagai kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikelola dengan perawatan medis atau layanan kesehatan.

Penyandang disabilitas telah menentang perspektif model medis ini selama bertahun-tahun. Daripada menggunakan model medis, banyak penyandang disabilitas lebih memilih menggunakan model sosial, untuk menjelaskan pengalaman mereka sebagai penyandang disabilitas dengan lebih baik. Model sosial melihat hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas karena masyarakat tidak mengakomodasi karakteristik fisik, mental atau sensorik mereka. Model ini kemudian berfokus pada apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah sikap dan lingkungan, untuk mengakomodasi karakteristik manusia yang berbeda sehingga penyandang disabilitas menghadapi lebih sedikit hambatan dan dapat bergabung dalam masyarakat sama seperti orang lain.

Model yang kita gunakan untuk mendefinisikan disabilitas dapat memberikan perbedaan besar dalam cara kita memahami penyandang disabilitas, apa yang mereka butuhkan, dan apa peran kita dalam membantu mereka untuk ikut terlibat.

Definisi disabilitas dalam UU PS berbeda dengan definisi yang digunakan oleh UU DD (dan SDP). Definisi dalam UU Diskriminasi Disabilitas (UU DP) lebih luas, mencakup disabilitas sementara, dan memiliki beberapa bagian yang lebih fokus pada model sosial, tetapi sebagian besar masih memandang disabilitas melalui model medis. Perbedaan-perbedaan ini dapat membingungkan sekolah-sekolah di WA karena sekolah harus menyadari kapan mereka harus menggunakan definisi UU DD/SDP dan kapan mereka harus menggunakan definisi UU PS.

Apa yang dikatakan sumber lain

Karena masyarakat memahami disabilitas dengan cara yang berbeda-beda, terdapat banyak definisi yang berbeda mengenai disabilitas di Australia dan di seluruh dunia.

Beberapa negara di dunia tidak mendefinisikan istilah disabilitas sama sekali, dan memandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia, di mana setiap orang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Gagasan ini mengakui bahwa penyandang disabilitas bukanlah satu kelompok orang dan mendorong pendekatan yang lebih inklusif, yang juga mempertimbangkan atribut-atribut lain yang mungkin dimiliki seseorang seperti budaya, bahasa, gender, status sosial ekonomi, orientasi seksual, yang dapat memengaruhi pengalaman dan kebutuhan seseorang.

CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak setuju dengan pendekatan 'model medis' dan memandang perbedaan fisik, mental atau sensorik sebagai bagian dari keberagaman manusia. Alih-alih, CRPD memandang pengalaman disabilitas sebagai sesuatu yang terjadi ketika penyandang disabilitas menghadapi sikap dan lingkungan yang menghalangi mereka untuk mengambil bagian penuh dalam masyarakat seperti orang lain. Menurut CRPD, disabilitas dan cacat fisik bukanlah hal yang sama.

Pada tahun 2022, Komisi Reformasi Hukum WA merekomendasikan agar *Undang-Undang Kesempatan yang Sama tahun 1984 (WA)* menggunakan istilah 'disabilitas' dan bukan 'cacat' dan mendefinisikannya seperti definisi dalam UU DD. Meskipun definisi UU DD lebih luas dibandingkan definisi UU PS, keduanya masih mengikuti pendekatan 'model medis' dan tidak selaras dengan CRPD.

Pertanyaan

3. Apakah definisi disabilitas dalam UU PS perlu diubah untuk meningkatkan akses dan inklusi? Jika ya, bagaimana definisinya?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Perhatikan definisi disabilitas dalam pasal 4 UU PS.
- Apakah menurut Anda definisi disabilitas dalam UU PS harus diubah agar lebih sesuai dengan CRPD? Atau dengan UU DD?
- Apakah menurut Anda UU PS memerlukan definisi tentang disabilitas? Apakah sebaiknya program ini hanya berfokus pada keberagaman dan menanggapi perbedaan serta kebutuhan siswa tanpa perlu menyebutkan disabilitas secara spesifik?

Referensi penting:

- CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) – lihat Pasal 1
- Hukum Keputusan Portugal No 54/2018
- *UU Pendidikan 1997* (New Brunswick, Kanada)
- Laporan Akhir Projek 111 Komisi Reformasi Hukum WA – Lihat rekomendasi 2

2. Saat mulai sekolah

Pendaftaran

Apa yang ada dalam UU PS

Berdasarkan pasal 78 UU PS, hak anak untuk mendaftar di sekolah negeri setempat dibatasi oleh 2 hal:

- 1) anak tersebut tinggal di area pendaftaran/area tampung setempat; dan
- 2) sekolah mempunyai program pendidikan yang sesuai.

'Program pendidikan yang sesuai' terkadang digunakan untuk memutuskan apakah seorang anak penyandang disabilitas dapat mendaftar di sekolah negeri setempat. Artinya, pendaftaran dapat dibatasi berdasarkan disabilitas anak.

WA adalah satu-satunya negara bagian/teritori di Australia yang Undang-Undanganya membatasi pendaftaran di sekolah negeri setempat berdasarkan apakah tersedia 'program pendidikan yang sesuai' di sana.

Apa yang dikatakan sumber lain

CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan jelas menyatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak boleh dikecualikan dari sistem pendidikan umum karena disabilitasnya. Mereka harus dapat mengakses sekolah-sekolah di komunitas tempat mereka tinggal, dan sekolah-sekolah tersebut harus inklusif.

Terdapat 4 dokumen hak asasi manusia lainnya yang relevan dengan pendaftaran sekolah karena disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk melindungi dan menjalankan budaya, agama, dan bahasa mereka. Hal ini juga berarti anak-anak harus dapat mendaftar di sekolah yang memberikan pendidikan dalam bahasa, kepercayaan, dan budaya mereka sendiri.

UU Diskriminasi Disabilitas (UU DD) dan *Undang-Undang Kesempatan yang Sama tahun 1984 (WA)* menyatakan bahwa sekolah yang menolak menerima atau membatasi manfaat bagi siswa karena disabilitas mereka adalah tindakan yang melanggar hukum. Pada tahun 2022, Komisi Reformasi Hukum WA menyarankan untuk mengubah *Undang-Undang Kesempatan yang Sama tahun 1984 (WA)* untuk memperjelas bahwa diskriminasi ketika mengevaluasi dan memilih lamaran siswa juga melanggar hukum.

Komisi Kerajaan untuk Disabilitas merekomendasikan agar semua negara bagian dan teritori mengubah Undang-Undang mereka untuk memastikan siswa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendaftar di sekolah umum setempat. Satu-satunya alasan sekolah dapat menolak pendaftaran adalah jika hal itu menyebabkan "kesulitan yang tidak dapat dibenarkan", seperti yang dijelaskan dalam UU DD.

Pertanyaan

4. Apakah UU PS perlu diubah sehingga ada hak yang jelas bagi siswa penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah negeri setempat?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Lihat pasal 78 dalam UU PS.
- Apakah menurut Anda pembatasan atas pendaftaran sekolah merupakan hambatan terhadap akses dan inklusi?
- Apakah menurut Anda anak-anak penyandang disabilitas juga berhak untuk bersekolah di sekolah non-pemerintah yang mencerminkan keyakinan, agama, atau bahasa mereka?

Referensi penting:

- CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) – lihat Pasal 24 dan Komentar Umum 4
- Laporan Akhir Projek 111 Komisi Reformasi Hukum WA – lihat rekomendasi 58
- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas – lihat Rekomendasi 7.1
- Deklarasi Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik – lihat Pasal 2 dan 4
- Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – lihat Pasal 13
- Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik – lihat Pasal 18
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli – lihat Pasal 14

Pilihan untuk keterlibatan

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS menyatakan bahwa setiap anak harus didaftarkan dalam suatu program pendidikan untuk setiap tahun masa wajib belajarnya. Hal ini dapat dicapai dengan mendaftar di sekolah, pendidikan di rumah, atau, pada tahun-tahun terakhir wajib belajar, dengan melakukan magang, pendidikan tinggi, pendidikan atau pelatihan kejuruan, atau pekerjaan yang disetujui. Namun, UU PS tidak mengizinkan seorang anak untuk didaftarkan pada pendidikan di rumah dan sekolah pada saat yang bersamaan, atau untuk didaftarkan secara paruh waktu.

Pasal 23 UU PS menyatakan bahwa kehadiran di sekolah harus penuh waktu kecuali kepala sekolah dan orang tua membuat pengaturan khusus berdasarkan pasal 24. Persyaratan penuh waktu ini juga berlaku bagi siswa yang memilih untuk melakukan magang atau pendidikan tinggi pada tahun-tahun terakhir mereka.

Apa yang dikatakan sumber lain

Gagasan mengenai pilihan pembelajaran yang fleksibel bagi siswa penyandang disabilitas memang rumit. Banyak laporan dan pertanyaan menyoroti perlunya pengaturan pembelajaran yang fleksibel.

Pada bulan Maret 2024, Komite Tetap Pendidikan dan Kesehatan Parlemen WA mengeluarkan sebuah laporan berjudul *Jenis Kecerdasan yang Berbeda: Laporan Penyelidikan mengenai Dukungan untuk Anak-anak dan Remaja Autis di Sekolah*. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa pengaturan yang fleksibel untuk siswa autis dapat membantu mereka tetap terlibat dalam pendidikan. Namun, banyak sekolah yang tidak mau mempertimbangkan pengaturan ini atau tidak yakin dengan kewenangan mereka untuk menyetujuinya. Laporan tersebut merekomendasikan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah mengenai persetujuan kehadiran yang fleksibel dan banyaknya mata pelajaran bagi siswa autis yang membutuhkannya.

Pada bulan Agustus 2023, Komite Referensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Parlemen Australia merilis laporan berjudul *Tren Nasional mengenai Penolakan Sekolah dan Masalah Terkait*. Laporan ini menemukan bahwa penolakan sekolah, yang juga disebut “larangan sekolah” paling umum terjadi di kalangan siswa penyandang disabilitas. Komite merekomendasikan agar otoritas pendidikan di Negara Bagian dan Teritori serta sekolah-sekolah non-pemerintah mencari cara untuk membuat pendidikan lebih fleksibel. Rekomendasi yang diberikan termasuk menjadikan sekolah publik lebih mudah beradaptasi dan memudahkan siswa yang menghadapi penolakan sekolah untuk mengakses pendidikan jarak jauh dan sekolah di rumah.

Baik Portugal maupun Italia memiliki undang-undang yang memperbolehkan penjadwalan sebagai suatu bentuk penyesuaian dan sebagai bagian dari rencana pendidikan individu bagi siswa penyandang disabilitas. Penyesuaian ini hanya untuk periode tertentu dan wajib ditinjau dan diawasi.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun fleksibilitas dapat membantu, tetapi juga dapat berisiko. Orang tua yang memiliki anak-anak dan remaja dengan kebutuhan yang lebih kompleks mungkin didorong untuk mengurangi waktu anak mereka di sekolah agar segalanya lebih mudah bagi sekolah. Untuk mencegah hal ini, Undang-Undang Selandia Baru menetapkan bahwa semua siswa mempunyai hak untuk bersekolah selama jam buka.

Pertanyaan

5. Apakah UU PS perlu memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara siswa terlibat dalam pendidikan? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Lihat pasal 9, 10, 11B, 23 dan 24 UU PS – apakah ada hambatan terhadap akses dan inklusi?
- Bagaimana fleksibilitas yang lebih besar dapat meningkatkan akses dan inklusi bagi anak-anak penyandang disabilitas?
- Risiko apa saja yang timbul karena fleksibilitas dan bagaimana siswa dapat dilindungi dari risiko tersebut?

Referensi penting:

- Laporan dari Komite Tetap Pendidikan dan Kesehatan Parlemen WA: *Jenis Kecerdasan yang Berbeda: Laporan Penyelidikan mengenai Dukungan untuk Anak-anak dan Remaja Autis di Sekolah* – lihat rekomendasi 14
- Laporan Komite Referensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Parlemen Australia: *Tren Nasional mengenai Penolakan Sekolah dan Masalah Terkait* - lihat rekomendasi 5
- Hukum Keputusan Portugal No 54/2018 – lihat Pasal 18-28
- UU Italia no. 104/1992
- *UU Pendidikan dan Pelatihan 2020* (Selandia Baru) - lihat bagian 33

3. Kehidupan di sekolah

Peran dan tanggung jawab

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS mencakup berbagai fungsi, peran, dan tanggung jawab bagi berbagai orang dan kelompok yang terlibat dalam pendidikan. Berikut ringkasannya:

Menteri Pendidikan

- Menteri mempunyai banyak tanggung jawab di dalam UU, dengan kewenangan utama di pasal 216 dan contoh penting lainnya di pasal 11M, 54, 55, 153, 159, 168, 201, 222, 223, dan 231 UU PS
- Peran penting termasuk mendirikan dan menutup sekolah, menetapkan standar untuk sekolah non-pemerintah, meninjau keputusan tertentu, dan memberikan pengecualian kepada sekolah dari peraturan Undang-Undang.

Pimpinan (Direktur Jenderal Departemen Pendidikan)

- Fungsi-fungsi utama Pimpinan diuraikan di pasal 61, dan contoh-contoh penting lainnya ada di pasal 46-53, 83, 84, 85, 94, 158-166, 232 dan 233 UU PS
- Peran penting termasuk menetapkan standar pelayanan dan pengajaran pendidikan di sekolah pemerintah, mengawasi pendidikan di rumah, menentukan dan membatalkan pendaftaran dalam keadaan tertentu, menentukan pengecualian dan mengawasi pendaftaran sekolah non-pemerintah.

Kepala Sekolah

- Kewenangan dan tanggung jawab utama semua kepala sekolah adalah mengelola proses pendaftaran dan pengaturan kehadiran (lihat pasal 19-21, 24, 26, 28 UU PS)
- Kepala sekolah pemerintah memiliki tanggung jawab yang diuraikan dalam bagian 63 yang mencakup memberikan kepemimpinan, memastikan keselamatan dan kesejahteraan siswa, bekerja sama dengan dewan sekolah dan staf untuk membuat rencana sekolah, mendorong pengajaran inovatif dan

memutuskan isi dan pelaksanaan program pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Guru di sekolah pemerintah

- Peran guru diuraikan dalam pasal 64 UU PS
- Mereka bertanggung jawab untuk mendorong pembelajaran dan memberikan pengajaran sesuai dengan kurikulum, standar Pimpinan (Dirjen), dan rencana sekolah.

Dewan sekolah

- Peran utama dewan sekolah tercantum dalam pasal 128 UU PS (lihat juga pasal 124-140)
- Mereka membantu merencanakan tujuan, prioritas, dan keuangan sekolah serta mengevaluasi kinerja sekolah.

Orang tua dan perkumpulan warga

- Peran kunci dari orang tua dan perkumpulan warga tercantum dalam pasal 143 UU PS (lihat juga pasal 141-149)
- Mereka memajukan kepentingan sekolah dengan membina kerjasama antara orang tua, guru, siswa, dan masyarakat, dan mendorong minat masyarakat terhadap pendidikan.

Staf pengajar taman kanak-kanak komunitas

- Peran mereka tercantum dalam pasal 205 UU PS
- Mereka bertanggung jawab untuk mendorong pembelajaran dan memberikan pengajaran

UU PS juga memperbolehkan beberapa tugas ini untuk didelegasikan, sebagaimana diuraikan dalam pasal 224, 225, dan 230.

Tidak ada satu pun fungsi dalam UU PS yang secara spesifik menyebutkan inklusi atau aksesibilitas. Dalam perincian UU PS, terdapat tanggung jawab kepala sekolah untuk mempertimbangkan kebutuhan siswa penyandang disabilitas (lihat bagian 73). Hal ini dibahas dalam area topik berikutnya dalam Makalah Diskusi. Pimpinan (Dirjen) atau Menteri tidak memiliki tanggung jawab untuk mendukung siswa penyandang disabilitas atau menjadikan sekolah secara luas lebih mudah diakses dan inklusif.

Apa yang dikatakan sumber lain

Negara bagian dan teritori Australia lainnya memiliki peran serupa dan tidak secara spesifik menyebutkan inklusi atau aksesibilitas sebagai tanggung jawab eksplisit siapa pun. Namun, di banyak negara bagian dan teritori lainnya, Undang-Undang mereka mencakup objek dan prinsip mengenai inklusi. Artinya, setiap orang yang bekerja berdasarkan Undang-Undang ini harus mengikuti objek dan prinsip dalam menjalankan perannya berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Pertanyaan

6. Apakah UU PS yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab perlu diubah? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Lihat pada bagian 61, 63, 64, 128, 143, 205 dan 216 UU PS – apakah ada peran yang mempunyai kewajiban terkait akses dan inklusi?
- Apakah ada peran, tanggung jawab atau fungsi yang masih belum ada dalam UU PS?

Referensi penting:

- Tidak ada

Hak mendapat penyesuaian dan belajar di kelas yang sama

Yang dimaksud dengan “penyesuaian yang wajar” atau “penyesuaian” adalah melakukan perubahan sehingga orang-orang dengan kebutuhan berbeda, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengambil bagian semudah orang lain. Ini mungkin melibatkan perubahan cara melakukan sesuatu atau lingkungan, sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan suatu layanan seperti orang lain.

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS tidak memberikan siswa penyandang disabilitas hak yang jelas untuk mendapat penyesuaian atau belajar di kelas yang sama dengan teman-temannya.

Namun, ada satu bagian (bagian 73) yang menguraikan proses terbatas bagi kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan unik anak penyandang disabilitas terkait dengan materi dan pelaksanaan program pendidikan. Pasal 73 hanya berlaku bagi siswa penyandang disabilitas di sekolah pemerintah dan menyatakan bahwa kepala sekolah harus berkonsultasi dengan orang tua, guru, dan ‘jika perlu’, dengan anak tersebut. Kepala sekolah yang berhak membuat keputusan akhir.

Apa yang dikatakan sumber lain

Hak asasi manusia berdasarkan CRC dan CRPD (termasuk Komentar Umum 4) mengatakan:

- anak mempunyai hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dengan cara yang dapat mereka pahami
- dukungan dan penyesuaian bagi masing-masing individu merupakan hal yang diprioritaskan dan harus diberikan secara gratis untuk semua tingkat pendidikan wajib
- menggunakan kekurangan sumber daya dan atau uang untuk membenarkan kegagalan mencapai kemajuan menuju pendidikan inklusif merupakan pelanggaran pasal 24 CRPD
- Anda melakukan diskriminasi jika Anda tidak melakukan penyesuaian bagi orang yang membutuhkan
- semua penyesuaian harus melibatkan proses konsultasi

Di Australia, UU DD dan SDP mengatakan bahwa semua sekolah harus melakukan ‘penyesuaian yang wajar’ bagi siswa bila diperlukan untuk memastikan mereka dapat

mengakses layanan yang disediakan oleh sekolah. Peraturan ini tidak menetapkan standar untuk desain yang universal.

Australian Capital Territory dan Northern Territory sama-sama mempunyai Undang-Undang pendidikan yang secara eksplisit memberikan penyesuaian yang wajar.

Ada beberapa rekomendasi terbaru terkait penyesuaian:

- Australia (melalui UU DD) dan WA (melalui *Undang-Undang Kesempatan yang Sama tahun 1984*) harus mempunyai tugas tersendiri untuk melakukan 'penyesuaian'. Satu-satunya pengecualian terhadap kewajiban ini adalah jika hal tersebut akan menciptakan 'kesulitan yang tidak dapat dibenarkan'
- Negara Bagian dan Teritori harus memiliki aturan dan langkah yang jelas untuk mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyesuaian.

Di Portugal, sekolah harus menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk dapat mendukung semua siswa. Ini termasuk memberikan penyesuaian bagi siswa yang memerlukannya. Tim multidisiplin, bersama dengan anak dan orang tua mereka, memutuskan dukungan yang dibutuhkan setiap siswa untuk dapat berpartisipasi penuh di sekolah, tidak peduli disabilitas mereka. Selain memberikan penyesuaian bagi siswa yang memerlukannya, Undang-undang Portugal juga menyatakan bahwa sekolah harus memiliki 'tindakan universal' untuk semua siswa. 'Tindakan universal' ini bertujuan untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua siswa secara umum.

CRPD (dan Komentar Umum No. 4) juga mengatakan sekolah harus mengambil tindakan yang universal. Dalam konteks sistem pendidikan, hal ini adalah tentang memastikan bahwa bangunan, informasi dan komunikasi, materi pendidikan, metode pengajaran dan penilaian dapat diakses secara universal oleh semua siswa, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan adaptasi individual atau 'retrofit'.

Pertanyaan

7. Apakah perlu ada perubahan pada UU PS mengenai penyesuaian bagi siswa penyandang disabilitas dan/atau tindakan universal? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Lihat pasal 73 UU PS dan lihat SDP
- Apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan akses dan inklusi?
- Haruskah Undang-undang pendidikan di WA mengenai penyesuaian atau tindakan universal berlaku untuk semua sekolah atau hanya sekolah pemerintah?

Referensi penting:

- CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) – lihat Pasal 24 dan Komentar Umum 4
- *UU Pendidikan 2004* (Australian Capital Territory) – lihat bagian 7(3)
- *UU Pendidikan 2015* (Northern Territory) – lihat bagian 52

- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas – lihat rekomendasi 4.25, 4.26 dan 7.3 Bagian A
- Laporan Akhir Proyek 111 Komisi Reformasi Hukum WA – Lihat rekomendasi 66-68
- Hukum Keputusan Portugal No. 54/2018 (Pasal 28) dan UU 46/86 (Pasal 18)

Komunikasi/konsultasi

Komunikasi, konsultasi dan kerja sama dapat membantu masyarakat untuk memahami satu sama lain, dan mempertimbangkan kebutuhan dan gagasan satu sama lain. Terkadang undang-undang dengan jelas menyatakan kapan konsultasi harus dilakukan. Hal ini sering terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau ketika diharapkan adanya hasil yang lebih baik melalui komunikasi yang jelas atau konsultasi.

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS memiliki sedikit bagian tentang konsultasi dan sangat sedikit yang melibatkan siswa. Pasal 73 mengatakan kepala sekolah harus berbicara dengan siswa ‘jika dipandang perlu’. Namun, panduan ini tidak menjelaskan bagaimana cara memutuskan apa yang dipandang perlu atau apa saja yang perlu dicakup dalam pembicaraan dengan siswa.

Apa yang dikatakan sumber lain

Menurut kewajiban Australia tentang hak asasi manusia internasional, baik CRC maupun CRPD mengatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai hal-hal yang berdampak pada mereka dan bahwa pandangan mereka harus diberi pertimbangan. “Pertimbangan” ditentukan dengan mempertimbangkan usia dan kematangan mereka. CRPD menambahkan bahwa siswa penyandang disabilitas harus mendapatkan bantuan yang tepat untuk mewujudkan hak ini.

Pemerintah Australia dan Komisi Kerajaan untuk Disabilitas merekomendasikan peningkatan konsultasi di sekolah-sekolah Australia. Rekomendasi yang diberikan adalah perubahan terhadap SDP, tetapi hal ini belum ditindaklanjuti. Meskipun rekomendasi tersebut ditujukan untuk SDP, negara bagian dan teritori dapat memilih untuk menerapkannya dalam undang-undang mereka sendiri. Rekomendasi tersebut meliputi:

- menetapkan prinsip bagaimana berkonsultasi dengan siswa dan keluarga mereka
- memastikan siswa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pengambilan keputusan mengenai program pendidikan mereka dan penyesuaian yang diperlukan
- memberikan hak kepada orang tua dan wali siswa penyandang disabilitas untuk dibantu oleh sekolah atau kepala sekolah dalam pengambilan keputusan mengenai penyesuaian fasilitas dan praktik kelas di seluruh sekolah jika hal tersebut berdampak pada siswa penyandang disabilitas.

Pada tahun 2016, Komite Referensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Senat Australia melaporkan tingkat akses dan pencapaian siswa penyandang disabilitas dalam sistem sekolah. Komite merekomendasikan agar siswa penyandang disabilitas dan keluarga mereka diikutsertakan dalam pengembangan rencana pendidikan untuk anak mereka, dan harus ada mekanisme untuk mendorong keterlibatan orang tua yang berkelanjutan.

Pertanyaan

8. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS mengenai tugas berkomunikasi, berkonsultasi dan/atau bekerja sama dengan siswa penyandang disabilitas dan orang tuanya. Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Apa yang membantu keberhasilan komunikasi dan kolaborasi?
- Haruskah sekolah mendukung siswa penyandang disabilitas untuk menyampaikan pandangan mereka? Apakah Anda mempunyai gagasan tentang bagaimana hal ini dapat dilakukan dengan baik?
- Haruskah sekolah mendukung orang tua penyandang disabilitas untuk menyampaikan pandangan mereka? Apakah Anda mempunyai gagasan tentang bagaimana hal ini dapat dilakukan dengan baik?
- Anda mungkin ingin memikirkan apakah semua perubahan yang Anda inginkan harus tertuang dalam UU PS atau mungkin ada beberapa yang lebih sesuai dalam bentuk peraturan.

Referensi penting:

- Laporan Akhir Tinjauan Standar Disabilitas untuk Pendidikan tahun 2005 - lihat rekomendasi 2
- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas - lihat rekomendasi 7.6
- Laporan Komite Referensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Senat: Akses terhadap pembelajaran nyata: dampak kebijakan, pendanaan dan budaya terhadap siswa penyandang disabilitas - lihat rekomendasi 9

4. Ketika sekolah tidak berjalan dengan baik

Disiplin, skorsing, dan pengeluaran

Apa yang ada dalam UU PS

Pasal 88-96 UU PS mencakup pelanggaran disiplin sekolah, skorsing, pengeluaran, dan peninjauan kembali keputusan. Bagian ini hanya berlaku untuk sekolah pemerintah.

Istilah kuncinya adalah 'pelanggaran disiplin sekolah', yang didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang mengganggu ketertiban sekolah.

Definisi tersebut tidak memperhitungkan apakah seorang siswa memiliki disabilitas, atau apa yang menyebabkan perilaku mereka, atau apakah sekolah telah berupaya

bersama siswa tersebut untuk menghindari 'pelanggaran disiplin sekolah' dengan menerapkan rencana dukungan dan mengikutinya.

Apa yang dikatakan sumber lain

Disiplin bagi siswa penyandang disabilitas memang rumit. Komisi Kerajaan untuk Disabilitas menemukan bahwa para guru dan staf sekolah di seluruh Australia dapat melihat perilaku terkait disabilitas karena siswa sengaja melakukan gangguan. Dalam kasus ini, siswa atau keluarga sering kali percaya bahwa perilaku tersebut merupakan tanda bahwa siswa tersebut disalahpahami, berperilaku tertekan karena kurangnya dukungan, atau memerlukan penyesuaian yang berbeda untuk membuat mereka lebih nyaman.

Kewajiban hak asasi manusia berdasarkan CRC dan CRPD menyatakan bahwa:

- sekolah tidak boleh menghukum siswanya karena disabilitas mereka
- kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak.

UU DD dan *Undang-Undang Kesempatan yang Sama tahun 1984 (WA)* menyatakan bahwa tindakan diskriminasi terhadap siswa atas dasar gangguan fisik siswa dengan mengeluarkan siswa tersebut atau melakukan tindakan merugikan lainnya adalah tindakan yang melanggar hukum.

Terdapat kritik bahwa proses pengeluaran dan skorsing di Australia bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia kita, seperti yang ditunjukkan oleh:

- banyaknya siswa penyandang disabilitas yang dikeluarkan dari sekolah, yang berarti penolakan atas akses terhadap pendidikan.
- fakta bahwa mengeluarkan anak-anak dari sekolah jarang sekali merupakan 'kepentingan terbaik bagi anak'.

Komisi Kerajaan untuk Disabilitas merekomendasikan agar negara bagian dan teritori memastikan bahwa:

- mengeluarkan siswa penyandang disabilitas adalah upaya terakhir
- pengeluaran hanya digunakan apabila terdapat risiko cedera yang serius
- keputusan untuk mengeluarkan harus mempertimbangkan disabilitas siswa
- sebelum seorang siswa dikeluarkan, harus diambil langkah-langkah tertentu termasuk konsultasi mengenai rencana perilaku individu dan penyesuaian yang wajar.

Victoria mempunyai perintah Menteri yang dibuat berdasarkan undang-undang pendidikannya yang mengharuskan disabilitas dipertimbangkan dalam masalah disipliner. Pada bulan Maret 2024, Queensland memperkenalkan rancangan undang-undang yang menyatakan bahwa sekolah harus membuat rencana dukungan bagi siswa penyandang disabilitas yang telah terkena skorsing atau berisiko dikeluarkan dari sekolah.

Pertanyaan

9. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS terkait disiplin, skorsing atau pengeluaran? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Perhatikan bagian 88-96 dalam UU PS
- Apakah konsep 'pelanggaran disiplin sekolah' merupakan hambatan terhadap akses dan inklusi bagi siswa penyandang disabilitas?
- Jika penyesuaian dan dukungan yang tepat tidak diberikan kepada siswa, mereka akan merasa tidak aman, tidak diterima, dan tidak tenang, dan mengomunikasikan hal ini melalui perilaku. Apakah benar jika mereka dikeluarkan karena perilakunya dalam situasi seperti ini?

Referensi penting:

- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas: Jilid 7 Pendidikan, lapangan kerja dan perumahan yang inklusif, Bagian A - lihat bagian 3.3
- CRC (Konvensi PBB tentang Hak Anak) – lihat Pasal 2, 3 dan 28
- CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) – lihat Pasal 7 dan 15
- UU Diskriminasi Disabilitas - lihat bagian 22
- *Undang-Undang Kesempatan yang Sama tahun 1984 (WA)* - lihat bagian 66I
- Down et al, 2024, *Apa yang hilang dalam wacana kebijakan tentang pengeluaran sekolah*, Studi Kritis dalam Pendidikan
- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas – lihat rekomendasi 7.2
- Perintah Menteri 1125 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Reformasi Pendidikan dan Pelatihan tahun 2006 (Victoria)
- RUU Pendidikan (Ketentuan Umum) dan Amendemen Perundang-undangan Lainnya 2024 (Queensland) - lihat pasal 94

Praktik pembatasan

Praktik pembatasan atau restriktif adalah tindakan atau intervensi yang membatasi kebebasan seseorang atau mengendalikan perilakunya. Praktik pembatasan terkadang digunakan sebagai respons terhadap pelanggaran disiplin atau untuk menjaga ketertiban. Ini dapat mencakup hal-hal seperti:

- pembatasan fisik: menahan atau menghalangi gerakan seseorang
- pembatasan kimia: menggunakan obat untuk menenangkan seseorang
- pembatasan mekanis: menggunakan perangkat seperti tali atau ikat pinggang untuk membatasi pergerakan atau menjauhkan perangkat komunikasi dari seseorang
- pengasingan: mengucilkan seseorang di sebuah kamar atau ruangan yang tidak dapat ditinggalkannya
- pembatasan lingkungan: mengubah lingkungan untuk membatasi pergerakan atau aktivitas seseorang, seperti mengunci pintu atau melepas alat bantu mobilitas

- psikososial: memberi tahu seseorang bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu, tanpa berusaha melakukan penyesuaian.

Apa yang ada dalam UU

Kewenangan untuk menggunakan beberapa praktik pembatasan terdapat dalam peraturan yang dibuat menurut UU PS.

Peraturan 38 Peraturan Pendidikan Sekolah tahun 2000 menyatakan bahwa staf sekolah pemerintah dapat mengambil tindakan yang wajar terhadap siswa atau properti mereka, termasuk kontak fisik karena alasan berikut:

- untuk mengelola atau merawat siswa
- untuk menjaga atau memulihkan ketertiban
- untuk mencegah seseorang mencederai orang lain atau merusak properti

Peraturan ini hanya berlaku untuk sekolah pemerintah.

Apa yang dikatakan sumber lain

Menurut CRC mengatakan bahwa semua anak mempunyai hak atas kebebasan dan perlindungan dari bahaya fisik atau mental. CRPD menambahkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak boleh dirampas kebebasannya tanpa alasan yang kuat. Memiliki disabilitas saja bukan alasan yang sah untuk merampas kebebasan seseorang. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dihormati dan mendapatkan perlakuan yang sama terhadap kesejahteraan fisik dan mentalnya seperti orang lain.

UU DD dan SDP tidak mencakup praktik pembatasan.

Komisi Kerajaan untuk Disabilitas merekomendasikan bahwa:

- harus ada banyak peraturan mengenai praktik-praktik pembatasan, termasuk hanya boleh digunakan ketika ada risiko cedera yang serius dan hanya sebagai upaya terakhir setelah mencoba strategi lain dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan pembatasan sesedikit mungkin. Setiap penggunaan praktik pembatasan harus ditinjau dan dipantau secara independen
- beberapa bentuk praktik pembatasan harus dilarang penggunaannya oleh sekolah
- perlu dikumpulkan data mengenai penggunaan praktik-praktik pembatasan
- harus ada target untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan penggunaan praktik-praktik pembatasan.

Penyelidikan penting lainnya di Australia juga merekomendasikan diakhirinya praktik pembatasan di sekolah.

Pertanyaan

10. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS (atau peraturan) mengenai praktik pembatasan? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Lihat Peraturan 38 dalam Peraturan Pendidikan Sekolah Tahun 2000
- Kebijakan dan Prosedur Perilaku Siswa di Sekolah Publik dari Departemen Pendidikan menyatakan bahwa pengekangan fisik hanya boleh digunakan selama waktu minimum yang diperlukan siswa untuk pulih ke perilaku. Ketika strategi yang tidak terlalu membatasi mungkin berhasil. Kebijakan tersebut juga menyatakan bahwa de-eskalasi harus diupayakan dalam jangka waktu yang wajar sebelum melakukan strategi yang membatasi. Apakah menurut Anda beberapa hal ini juga harus ada dalam UU PS?

Referensi penting:

- CRC (Konvensi PBB tentang Hak Anak) – lihat pasal 19 dan 37
- CRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) – lihat pasal 14 dan 17
- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Pelecehan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas - lihat rekomendasi 6.35, 6.36, 6.39 dan 6.40
- Laporan Komite Referensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Senat: Akses terhadap pembelajaran nyata: dampak kebijakan, pendanaan dan budaya terhadap siswa penyandang disabilitas - lihat rekomendasi 10

Panel Penasihat Disabilitas dan Panel Penasihat Disiplin

Apa yang ada dalam UU PS

UU PS membentuk 2 panel berbeda untuk mempertimbangkan kasus pengeluaran di sekolah pemerintah. Mereka memeriksa setiap kasus dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan (Dirjen). Namun, Pimpinan tidak harus mengikuti rekomendasi tersebut.

Siswa dapat dikeluarkan dari sekolah pemerintah jika perilakunya memenuhi kriteria dalam:

- pasal 91(a) – jika mereka mengancam atau berdampak buruk terhadap seseorang atau merusak properti
- pasal 91(b) – jika mereka mengganggu pembelajaran siswa lain

Panel Penasihat Disabilitas

Menurut Pasal 87, Panel Penasihat Disabilitas harus dibentuk ketika seorang siswa penyandang disabilitas (sebagaimana didefinisikan dalam UU PS) direkomendasikan untuk dikeluarkan berdasarkan Pasal 91(b).

Panel Penasihat Disiplin

Menurut Pasal 92, Panel Penasihat Disiplin harus dibentuk untuk siswa non-disabilitas yang direkomendasikan untuk dikeluarkan berdasarkan Pasal 91(a) atau 91(b).

Terdapat kesenjangan yang mencolok bahwa siswa penyandang disabilitas, yang dikeluarkan berdasarkan pasal 91(a), tidak berhak mendapatkan proses Panel Penasihat Disabilitas atau Panel Penasihat Disiplin.

Apa yang dikatakan sumber lain

Kesenjangan penggunaan panel hanya berlaku pada UU PS sehingga apa yang dilakukan tempat lain tidak relevan dengan hal ini.

Pertanyaan

11. Apakah perlu ada perubahan pada bagian Panel Penasihat Disabilitas dan/atau Panel Penasihat Disiplin dalam UU PS? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Perhatikan pasal 87, 91 dan 92 dalam UU PS.
- Bagaimana panel dapat diubah untuk meningkatkan akses dan inklusi bagi siswa penyandang disabilitas?
- Seperti yang kami kemukakan sebelumnya, beberapa tempat tidak mendefinisikan disabilitas dan mengacu pada keberagaman dan bahwa semua siswa berbeda dan memiliki kebutuhan berbeda, sehingga sekolah harus mempertimbangkan dan memberikan penyesuaian. Konsep ini juga bisa diterapkan pada panel-panel ini.

Referensi penting:

- Tidak ada

Perselisihan dan pengaduan

Apa yang ada dalam UU PS

Pasal 118 UU PS adalah bagian penting yang mengatur perselisihan dan pengaduan, dan ini hanya berlaku untuk sekolah pemerintah. Pasal 118 pendek dan hanya mengatakan bahwa peraturan dapat dibuat untuk mengatur cara menangani perselisihan dan pengaduan mengenai penyediaan pendidikan atau perilaku anggota staf pengajar.

Apa yang dikatakan sumber lain

Komentar Umum 4 pada Pasal 24 CRPD mengatakan bahwa harus ada cara yang independen, efektif, mudah diakses, transparan, aman dan dapat ditegakkan untuk menangani pengaduan dan permasalahan hukum dalam kasus-kasus mengenai hak atas pendidikan. CRPD mengatakan penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dengan cara yang dapat mereka pahami, menerima dukungan untuk berpartisipasi penuh dalam proses yang memengaruhi kehidupan mereka, dan hak mereka serta keluarga mereka untuk melakukan advokasi atas hak asasi mereka.

Komisi Kerajaan untuk Disabilitas memberikan beberapa rekomendasi mengenai pengaduan dan perselisihan, antara lain:

- Pemerintah negara bagian dan teritori harus membentuk atau memperluas kantor yang menangani pengaduan tentang sekolah untuk membantu menyelesaikan pengaduan, terutama dalam kasus siswanya menyandang disabilitas. Kantor-kantor ini harus terpisah dari sekolah dan harus:

- memberikan informasi kepada siswa dan orang tua tentang hak dan pilihan yang mereka miliki
- melakukan konsiliasi, menghubungkan keluarga dengan dukungan disabilitas
- memulai penyelidikan formal jika pengaduannya serius atau merupakan masalah sistemik
- Apabila suatu pengaduan tidak dapat diselesaikan, membantu untuk merujuknya ke badan independent
- membantu menganalisis pengaduan dan melaporkan cara memperbaiki sistem pendidikan
- bekerja sama dengan kepala sekolah untuk memastikan kebijakan sekolah berfokus pada siswa, dapat diakses, efisien, aman, memperhatikan trauma, dan sesuai dengan budaya
- SDP harus mencakup tugas-tugas dan langkah-langkah baru untuk menangani pengaduan guna memastikan prosesnya berfokus pada siswa, dapat diakses, efisien, aman, memperhatikan trauma, dan sesuai dengan budaya. Peraturan ini harus berlaku untuk semua sekolah, termasuk sekolah non-pemerintah, untuk memantau dan menegakkan kepatuhan.

Peninjauan SDP tahun 2020 merekomendasikan agar SDP diubah dengan memasukkan prinsip-prinsip dalam proses penanganan pengaduan.

Pertanyaan

12. Apakah perlu ada perubahan dalam UU PS sehingga pengaduan dapat ditangani dengan cara yang berbeda? Jika ya, sebaiknya seperti apa?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Perhatikan pasal 118 dalam UU PS
- Seperti apa proses penanganan pengaduan yang baik?
- UU PS hanya memuat sedikit perincian mengenai penanganan pengaduan. Menurut Anda, apakah perincian ini perlu diperluas untuk mencakup beberapa saran yang dibuat oleh Komisi Kerajaan untuk Disabilitas atau tinjauan SDP?

Referensi penting:

- Laporan Akhir Komisi Kerajaan mengenai Kekerasan, Penganiayaan, Pengabaian dan Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas - lihat rekomendasi 7.10

Memastikan kita terus makin baik

Permasalahan dan pertanyaan dalam makalah ini adalah tentang gagasan perubahan UU PS untuk meningkatkan akses dan inklusi bagi anak-anak dan remaja penyandang disabilitas.

Pertanyaan terakhir dari Makalah Diskusi ini adalah untuk mengetahui apakah Anda mempunyai gagasan untuk mengubah UU PS sedemikian rupa sehingga dapat membantu kita mengetahui apakah kita benar-benar makin baik atau tidak.

Pertanyaan

13. Dengan mempertimbangkan semua perubahan yang Anda usulkan, bagaimana pemerintah dapat memantau apa yang terjadi dan menunjukkan bahwa segala sesuatunya makin baik?

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

- Anda mungkin ingin mempertimbangkan hal-hal seperti pengumpulan data, akuntabilitas, dan pelaporan.

Referensi penting:

- tidak ada

Lampiran A

Istilah-istilah penting dan singkatannya

CRC –Konvensi PBB tentang Hak Anak (United Nations Convention for the Rights of the Child)

CRPD –Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention for the Rights of Persons with Disabilities)

Cth – Persemakmuran Australia

UU DD – *Undang Undang Diskriminasi Disabilitas 1992 (Cth)*

SDP – Standar Disabilitas untuk Pendidikan 2005 (Cth)

LRCWA – Komisi Reformasi Hukum Western Australia

UU PS – *UU Pendidikan Sekolah 1999*

WA – Western Australia